BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian disuatu negara, baik negara yang berkembang walaupun negara yang masih berkembang. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih berkembang, sehingga lembaga keuangan dalam kehadirannya sangat membantu adanya perkembangan suatu perekonomian di Indonesia (Daniatu dkk., 2015). Menurut Julie (2016), krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada tahun 1997, yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat, beserta menurunnya kemampuan usaha kecil walaupun besar untuk mengembangkan usahanya, sehingga peranan lembaga keuangan ini merasa sangat membantu untuk perkembangan ekonomi di Indonesia ini. Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan yang mengadakan pembiayaan modal untuk pendirian usaha walaupun pengembangan usaha, jenis lembaga keuangan ini yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Daniatu dkk., 2015). Lembaga keuangan ini mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi hanya memiliki perbedaan yang terletak pada prinsipnya, lembaga keuangan konvensional lebih menerapkan prinsip bunga, namun lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah islam. Saya mengambil penelitian ini menggunakan pembiayaan murabahah karena 60% di bmt nu jombang cabang diwek

kebanyakan nasabah pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan mudhorobah yang jauh lebih sedikit rata-rata di bmt nu jombang cabang diwek menggunakan pembiayaan murabahah untuk modal usaha. Sebelum adanya lembaga keuangan syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya, mereka cenderung meminjam dan dengan cara melalui rentenir atau lembaga keuangan konvensional yang cenderung bunga dan persyaratan yang sangat sulit, sehingga para pencari dana merasa kesulitan dalam mencari penambahahn dana untuk perkembangan usaha walaupun pendirian usahanya (Daniatu dkk., 2015). Pusat Ikunbasi Bisis Usaha Kecil (PINBUK) merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai prinsip syariat islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dikalangan masyarakat (Daniatu dkk., 2015).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), merupakan lembaga yang memberikan layanan berupa pemberian dana dan menghimpun dana untuk para nasabah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat di dalam produk yang ditawarkan oleh BMT, karena mudahnya penanganan administrasi, dan mudahnya persyaratan yang diajukan kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah. Heykal & Huda (2010: 363). Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituliskan dalam kontrak, pembiayaan jenis ini

pembayarannya dapat dilakukan dengan cara cicilan dengan jatuh tempo yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dan besarnya angsuran tetap sampai akhir pelunasan pembiayaan (Nabila dkk.,2015). Dengan banyaknya pembiayaan yang terjadi didalam BMT, tentu menyebabkan terjadinya banyak piutang Murabahah, untuk menjaga pembiayaan Murabahah tetap tersalurkan dengan baik dan dapat berjalan dengan akad perjanjian, maka diperlukan suatu pengendalian piutang murabahah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh manajemen (Karlina, 2017).

Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah dalam pengontrolan sebaiknya bmt harus membuat peraturan kepada nasabah jika dalam waktu pencairan uang pembiayaan murabahah harus memberitahu atau konfirmasi kepada pegawai jika membeli kebutuhan yang sesuai ditulis di buku pengajuan. Dan peraturan itulah yang harus dibuat agar saling terpercaya kepada dua belah pihak.

Secara syariah pembiayaan murabahah di BMT NU Jombang menggunakan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang isinya mewakilkan pembelian barang kepada nasabah secara syariah kalau akad jual beli itu barang yang barang yang dibeli oleh pihak bank. Tapi kalau bmt ini memakai wakalah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli semua keperluannya sendiri setelah uang dipegang oleh nasabah pihak bank tidak bisa mengetahui uangnya untuk apa saja tidak bisa mengontrol tidak bisa mengetahui mungkin saja uang itu bisa

dipakai untuk hal lain selain modal. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pengajuan pinjaman dan penggunaan realisasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Jombang Cabang Diwek**”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada BMT NU Jombang Cabang Diwek ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada BMT NU Jombang Cabang Diwek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman mengenai analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada BMT NU Jombang Cabang Diwek Kabupaten Jombang.
2. Bagi investor, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dimasa yang akan datang untuk menginvestasikan dana ke BMT NU Jombang Cabang Kabupaten Jombang.

3. Bagi BMT NU Jombang Cabang Diwek, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisis mengenai analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah yang telah diterapkan